

Hubungan HAM dengan Pancasila dan UUD 1945

Posted on February 15, 2018 by Unknown with No comments

A. HAM dalam Pancasila

HAM, yaitu hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Menurut Oemar Seno Aji (1966), HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai insan ciptaan Allah SWT, seperti hak hidup, keselamatan, kebebasan dan kesamaan sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Menurut Kuncoro (1976), HAM adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya dan tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya. G.J.Wollhof menambahkan, "HAM adalah sejumlah hak yang berakut pada tabi'at setiap pribadi manusia, dan tidak dapat dicabut oleh siapapun."

Hubungan antara Pancasila dan HAM di Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sila Ketuhanan yang maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama. Sila tersebut mengamanatkan bahwa setiap warga negara bebas untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini selaras dengan Deklarasi Universal tentang HAM (Pasal 2) yang mencantumkan perlindungan terhadap HAM
2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang. Sila Kedua, mengamanatkan adanya persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Deklarasi HAM PBB yang melarang adanya diskriminasi.
3. Sila Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu diantara warga Negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan, hal ini sesuai dengan prinsip HAM Pasal 1 bahwa Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.
4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Inti dari sila ini adalah musyawarah dan mufakat dalam setiap penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan sehingga setiap orang tidak dibenarkan untuk mengambil tindakan sendiri, atas inisiatif sendiri yang dapat mengganggu kebebasan orang lain. Hal ini sesuai pula dengan Deklarasi HAM.
5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Asas keadilan dalam HAM tercermin dalam sila ini, dimana keadilan disini ditujukan bagi kepentingan umum tidak ada pembedaan atau diskriminasi antar individu.

B. HAM dalam UUD 1945

Dasar-dasar HAM tertuang dalam UUD 1945 Republik Indonesia selanjutnya dapat ditemukan dalam sejumlah pasal Batang Tubuh UUD:

1. Pasal 27 ayat (1): "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"
2. Pasal 28: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang"

Popular Posts

Wewenang Lembaga Negara Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945

MPR SEBELUM AMANDEMEN SESUDAH AMANDEMEN Membuat putusan yang tidak dapat ditentang oleh lembaga ne...

Contoh Makalah Hukum Perdata

MAKALAH HUKUM PERDATA BAB I

<p>4. Pasal 30 ayat (1): “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”</p> <p>5. Pasal 31 ayat (1): “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”.</p> <p>Hak dan Kewajiban Warga Negara yang Diatur Dalam UUD 1945</p> <p>Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam UUD 1945 yang meliputi :</p> <p>A. Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi.</p> <p>Di dalam Pasal 27 ayat (2) Perubahan UUD 1945 ditentukan : “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dalam Pasal 28D ayat (2) Perubahan UUD 1945 ditentukan :Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Selanjutnya khusus mengenai perekonomian diatur dalam Pasal 33 Perubahan UUD 1945 yaitu :</p> <p>(1). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.</p> <p>(2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.</p> <p>(3). Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Penelusuran dalam kepustakaan ditemukan bahwa hak asasi manusia bidang ekonomi adalah hak yang berkaitan dengan aktivitas perekonomian, perburuhan, hak memperoleh pekerjaan, perolehan upah dan hak ikut serta dalam serikat buruh.</p> <p>B. Hak Asasi Manusia di bidang Sosial dan Budaya</p> <p>a. Hak asasi Manusia di bidang Sosial</p> <p>Hak asasi manusia bidang sosial adalah hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak atas jaminan sosial, hak atas perumahan dan hak atas pendidikan. Dalam Perubahan UUD 1945 ditentukan sbb :</p> <p>Pasal 28H ayat (3) Perubahan UUD 1945 menentukan : ”Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”</p> <p>Pasal 28H ayat (1) Perubahan UUD 1945 menentukan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”</p> <p>Pasal 31 Perubahan UUD 1945 menentukan tentang pendidikan dan kebudayaan yaitu :</p> <p>(1) Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan</p> <p>(2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.</p> <p>(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-undang.</p> <p>(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.</p> <p>(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.</p> <p>b. Hak Asasi manusia di bidang Budaya</p> <p>Hak asasi manusia dalam bidang budaya dapat diidentifikasi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 28C Perubahan UUD 1945 menentukan bahwa :</p> <p>”Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”</p> <p>Pasal 28I ayat (3) Perubahan UUD 1945 menentukan bahwa:</p> <p>”Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”</p> <p>Pasal 32 Perubahan UUD 1945 menentukan :</p>	<p>kenidupan antara seseorang itu didasarkan pada ada...</p> <p>Hubungan HAM dengan Pancasila dan UUD 1945</p> <p>A. HAM dalam Pancasila HAM, yaitu hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan ti...</p> <p>Categories</p> <p>acer predator</p> <p>ciri-ciri hamil</p> <p>Hak Atas tanah</p> <p>hamil muda</p> <p>harga iPhone 7</p> <p>Hukum Pidana adalah</p> <p>iPhone 7</p> <p>iPhone 7 Plus</p> <p>iPhone 7 terbaru</p> <p>laptop acer</p> <p>laptop gaming</p> <p>laptop gaming murah</p> <p>Lombok</p> <p>Makalah Hukum Perdata Lengkap</p> <p>Makalah Tax amnesty</p> <p>spesifikasi iPhone 7</p> <p>spesifikasi laptop acer predator</p> <p>Tempat Foto di Lombok</p>
--	---

Home

(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Di dalam Perubahan UUD 1945 ditegaskan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

[Blog Archive](#)[Search This Blog](#)[Search](#)[Powered by Blogger.](#)[Report Abuse](#)[Beranda](#)[Newer Post](#)[Home](#)[Older Post](#)

0 comments:

Post a Comment



Comment as:

[Sign out](#)[Publish](#)[Preview](#)☐ [Notify me](#)[Subscribe to: Post Comments \(Atom\)](#)[BTemplates.com](#)[About](#)

Home
